



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



# RENCANA AKSI KEGIATAN



**2020 - 2024**

**BADAN PPSDM KESEHATAN**

**BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BBPK) JAKARTA**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta di Tahun 2020. Rencana Aksi Kegiatan bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi organisasi dalam menjalankan kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun, periode tahun 2020 – 2024.

RAK dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan pemerintah dalam tahun berjalan yang dapat dijadikan pedoman dalam penetapan rencana kinerja, rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi. Rencana kinerja selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, yang ditandatangani diawal periode sebagai komitmen pimpinan dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Rencana kegiatan selanjutnya dituangkan dalam dokumen anggaran, sebagai salah satu pedoman dan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai target kinerja. Dokumen ini juga akan dituangkan dalam instrumen pemantauan, yang akan digunakan secara periodik untuk menilai capaian kinerja secara valid, akurat dan transparan. Dan pada akhirnya, dokumen ini akan menjadi latar belakang pelaporan kinerja yang telah dicapai diakhir tahun, yaitu penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP).

Namun demikian, penyusunan RAK BBPK Jakarta ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam hal pencantuman data dan informasi. Kami terbuka untuk koreksi dan masukan terhadap dokumen ini dalam rangka penyempurnaan RAK ini.

Jakarta, Desember 2020  
Kepala,



Laode Muis

NIP.197109171997031004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
a. Latar Belakang Organisasi	1
b. Sejarah BBPK Jakarta	2
c. Landasan Hukum Organisasi	3
d. Visi BBPK Jakarta	4
e. Misi BBPK Jakarta	5
f. Tujuan	5
g. Nilai – nilai	5
h. Motto	6
i. Logo	6
<b>BAB II ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>8</b>
a. Arah Kebijakan Badan PPSDM	8
b. Arah Kebijakan BBPK Jakarta	9
<b>BAB III ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS</b>	<b>10</b>
a. Faktor Eksternal	10
1) Regulasi	10
2) Segmen Pasar (Pengguna)	11
3) Kompetitor	11
4) Supplier	11
5) Stakeholders Lain	12
6) Produk Substitusi	14
7) Faktor Lingkungan Eksternal Lainnya	14
b. Faktor Internal	15
1) Aktivitas Utama	15
2) Aktivitas Pendukung	15
c. Analisis SWOT	16
1) Kekuatan	
2) Kelemahan	

3) Peluang	
4) Ancaman	
d. Asumsi – asumsi	35
e. Isu Strategis	35
<b>BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN ORGANISASI</b>	<b>36</b>
a. Strategi Pengembangan	36
b. Sasaran	36
c. Indikator Kinerja	37
d. Target Tahunan	37
<b>BAB V KEGIATAN, TARGET KINERJA DAN PENDANAAN</b>	<b>41</b>
a. Matriks Rencana Kinerja	44
b. Matriks Rencana Anggaran	48
<b>BAB VI SIMPULAN DAN MONITORING</b>	<b>51</b>
a. Simpulan	51
b. Definisi Monitoring dan Evaluasi	51
c. Merencanakan Monitoring dan Evaluasi	52
d. Kerangka Kerja Monitoring dan Evaluasi	53
e. Rencana Monitoring	54
f. Rencana Evaluasi	54
g. Sumber Daya Untuk Melakukan Monitoring dan Evaluasi	54
h. Pelibatan Stakeholders untuk Monitoring dan Evaluasi	54
i. Instrumen untuk Melakukan Monitoring dan Evaluasi	55
<b>BAB VII PENUTUP</b>	<b>60</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG ORGANISASI**

Dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, disebutkan bahwa pembangunan Kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Periode tahun 2020 – 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN\_ 2005 – 2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020 – 2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN (Kementerian Kesehatan, 2020).

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program – program pembangunan Kesehatan yang akan dilaksanakan Kementerian Kesehatan dan jajarannya dengan mendorong peran aktif masyarakat. Renstra Kemenkes merupakan acuan bagi Kemenkes dalam penyelenggaraan program pembangunan Kesehatan termasuk didalamnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing. Rencana Aksi Program (RAP) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen implementasi Renstra Kemenkes di bidang pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas SDM Kesehatan. Semua kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM Kesehatan mengacu pada RAP Badan PPSDM Kesehatan.

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Puslat SDM Kesehatan) Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen implementasi RAP Badan PPSDM Kesehatan yang berfokus kepada peningkatan kompetensi SDM Kesehatan.

Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan PPSDM Kesehatan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelatihan sumber daya manusia Kesehatan.

Landasan hukum yang mendukung perlunya pelatihan termaktub dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 70 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 210 dan 212, yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai hak untuk pengembangan kompetensi melalui Pendidikan, pelatihan, seminar, kursus dan atau penataran.

Perencanaan kegiatan pengembangan program pelatihan di BBPK Jakarta dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Kegiatan (RAK) yang mengacu pada Rencana Aksi Program (RAP) Badan PPSDM Kesehatan dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Pusat Pelatihan SDM Kesehatan. RAK BBPK Jakarta Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman implementasi Rencana Kinerja Tahunan (RKT), untuk mendukung Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan.

## **B. SEJARAH BBPK JAKARTA**

BBPK Jakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan. Berdirinya BBPK Jakarta merupakan proses sejarah yang panjang, dimulai dengan berdirinya Kursus Tambahan Bidan (KTB) pada tahun 1960 – 1970 yang berlokasi di Jalan Fatmawati. Berturut – turut KTB berganti nama menjadi Pusat Latihan Kesehatan Masyarakat Nasional (PLKMN) yang berlokasi di daerah Dapur Susu Jalan Wijaya Kusuma, kemudian berubah lagi menjadi Balai Latihan Kesehatan Masyarakat pada tahun 1976.

Berdasarkan hasil analisis jabatan di lingkungan Balai Diklat Kesehatan, maka ditetapkan SK Menteri Kesehatan Nomor : 911/Menkes/SK/X/1993 tanggal 20 Oktober 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Kesehatan, maka BLKM Cilandak berubah menjadi Bapelkes Cilandak dengan klasifikasi A. berdasarkan SK tersebut, maka secara administrative, Bapelkes Cilandak merupakan UPT Pusdiklat Kesehatan. Sembilan tahun kemudian, melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 556/Menkes/SK/VI/2002, Bapelkes Cilandak menjadi UPT Badan PPSDM Kesehatan secara administrated, walaupun secara teknis tetap menjadi UPT Pusdiklat SDM Kesehatan.

Pada tanggal 29 Mei 2006, dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 382A/Menkes/Per/V/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Cilandak, berdasarkan peraturan tersebut, nama Bapelkes Cilandak secara resmi telah berubah menjadi BBPK Cilandak. Permenkes ini menjadi tonggak berdirinya BBPK Cilandak dengan organisasi dan tata kerja yang baru. BBPK Cilandak merupakan UPT di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada dan bertanggung jawab kepada Badan PPSDM Kesehatan,

Dalam rangka pengembangan fungsi pelaksanaan kerjasama nasional dan internasional di bidang Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Kesehatan dan masyarakat serta tugas pengembangan kemitraan dan jejaring diperlukan akses terhadap sistem informasi yang memudahkan pengenalan kedudukan BBPK yang berada di ibukota Republik Indonesia, yaitu Jakarta. Oleh karena itu, melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 704/MENKES/SK/VIII/2009, nama BBPK Cilandak berubah menjadi BBPK Jakarta. Nama ini yang kemudian digunakan hingga saat ini.

### **C. LANDASAN HUKUM ORGANISASI**

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/MENKES/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024
7. Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2020 – 2024
8. Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2020 – 2024
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan

#### **D. VISI BBPK JAKARTA**

BBPK Jakarta unggul berbasis teknologi yang menghasilkan SDM berdaya saing Internasional tahun 2024.



## **E. MISI BBPK JAKARTA**

1. Menyelenggarakan pelatihan yang mempunyai kompetensi terstandarisasi internasional.
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam seluruh proses bisnis BBPK Jakarta
3. Menyediakan SDM BBPK Jakarta yang diakui secara internasional
4. Menyediakan Sarana Prasarana berstandar internasional
5. Menyediakan anggaran untuk mendukung BBPK Jakarta berstandar internasional

## **F. TUJUAN BBPK Jakarta**

Tujuan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta adalah Menciptakan SDM unggul untuk melaksanakan program Kementerian Kesehatan.

## **G. NILAI – NILAI**

Nilai – nilai BBPK Jakarta adalah **KERJA** dan **DOA** :

1. **Komitmen**
2. **Etika**
3. **Responsif**
4. **Jujur**
5. **Akuntabel**
6. **Dedikasi**
7. **Optimis**
8. **Amanah**

Nilai – nilai tersebut tercermin dalam **Maklumat Pelayanan yang menyebutkan bahwa BBPK Jakarta** bersedia memberika pelayanan kepada masyarakat dan penggunanya dengan cara ber**komitmen** memberikan pelayanan yang berkualitas, menjunjung tinggi **etika** profesionalisme, **responsif** terhadap kebutuhan, **jujur**, patuh terhadap aturan yang berlaku, menjamin pelaksanaan pelayanan

yang **akuntabel**, menyiapkan petugas yang ber**dedikasi** dan siap melayani, senantiasa bersikap **optimis** dalam mencapai target – target yang telah ditetapkan dan bersikap **amanah** dalam mengemban tugas.

## H. MOTTO

Motto BBPK Jakarta adalah :

***“Diklat Berkualitas SDM Cerdas”***

## I. LOGO

Berdasarkan persetujuan dari Sekretaris Badan PPSPM Kesehatan yang disampaikan dalam surat Nomor: HK.01.06/I.2/5256/2019 tanggal 24 Juli 2019, Pada Tahun 2019 Hal Tanggapan terhadap Persetujuan Logo, BBPK Jakarta membuat logo sebagai berikut:



Filosofi dari logo BBPK Jakarta adalah:

1. **Tugu Monas di ujung pena**, bermakna bahwa BBPK Jakarta berlokasi di Provinsi DKI Jakarta
2. **Dasar Putih yang bergelombang/air**, bermakna bahwa BBPK Jakarta merupakan tempat menimba ilmu bagi SDM kesehatan dan masyarakat.

3. **Pita bertuliskan angka 1960 dan Kesatria Bakti Husada**, bermakna warga dan alumni BBPK Jakarta merupakan pejuang dalam upaya kesehatan yang paripurna dan penuh ilmu.
4. **Sayap berjumlah 8 (4 sisi kanan dan 4 sisi kiri)**, bermakna 4 kelompok SDM BBPK Jakarta (struktural, widyaiswara, staf teknis dan staf pelayanan) mempunyai energi yang terus bergeraksetingginya untuk mengikuti perkembangan.
5. **Pena Emas**, bermakna BBPK Jakarta merupakan penyelenggara pelatihan, tempat belajar SDM Kesehatan dan masyarakat untuk mencapai kejayaan.

## **BAB II**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN PPSDM KESEHATAN**

Sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan yang akan dicapai dalam pelaksanaan programnya selama 5 (lima) tahun dari tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Puskesmas tanpa dokter sebesar 0%.
2. Terpenuhinya Puskesmas dengan jenis tenaga Kesehatan sesuai standar sebesar 83%.
3. Terpenuhinya RSUD Kab/Kota yang memiliki dokter spesialis dasar dan spesialis lainnya sebesar 90%.
4. Tersedianya SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 167.742 orang.

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Badan PPSDM Kesehatan melakukan berbagai upaya berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
6. Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan
7. Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
8. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program

## **B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BBPK JAKARTA**

### **Arah Kebijakan BBPK Jakarta:**

1. Peningkatan kuantitas, serta jenis pelatihan SDM Kesehatan dan Masyarakat;
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya pengelolaan pelatihan;
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pelatihan.

### **Strategi BBPK Jakarta:**

Dalam mendukung sasaran strategi Badan PPSDM Kesehatan, BBPK Jakarta sebagai sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan PPSDM Kesehatan memiliki strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah dan jenis pelatihan
2. Peningkatan mutu dan pelatihan melalui akreditasi institusi dan akreditasi pelatihan
3. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelolaan pelatihan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
4. Peningkatan jumlah dan jenis sarana prasarana pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan era globalisasi
5. Pengembangan sistem teknologi informasi dalam semua jenis pelayanan di BBPK Jakarta
6. Optimalisasi peran mitra dan jejaring kerja



## **BAB III**

### **ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS**

#### **A. FAKTOR EKSTERNAL**

##### **1) REGULASI**

Pada Tahun 2018 Organisasi dan Tata Kerja BBPK Jakarta mengalami perubahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan. Mengacu Permenkes tersebut, BBPK Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan. Adapun fungsi BBPK Jakarta adalah menyelenggarakan:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, pelatihan manajemen, dan pelatihan unggulan tertentu;
- c. pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
- d. pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan kesehatan;
- e. pelaksanaan kerja sama di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
- f. penyelenggaraan kerja sama internasional di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
- g. pengelolaan sistem informasi pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan; dan

- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Besar Pelatihan Kesehatan.

## **2) SEGMENT PASAR**

Adalah kelompok – kelompok sasaran yang memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda.

- Tenaga Kesehatan;
- Tenaga Non Kesehatan;
- Struktural dan manajemen;
- Unit – unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Kementerian/Lembaga;
- TNI - Polri;
- Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan dan Kementerian/Lembaga;
- Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota;
- Rumah Sakit Provinsi, Kabupaten/Kota,
- Rumah Sakit / Klinik Swasta;
- Puskesmas;
- Perguruan Tinggi;
- Masyarakat (Organisasi Masyarakat/Organisasi Profesi Kesehatan);
- Perusahaan swasta.

## **3) KOMPETITOR**

Kompetitor BBPK Jakarta adalah unit diklat yang sudah mendapatkan akreditasi dan menyelenggarakan pelatihan sejenis.

## **4) SUPPLIER**

*Supplier* adalah Pemasok yang mendukung penyelenggaraan pelatihan berupa produk dan jasa.

- a. Unit-unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. Kementerian/Lembaga;

- c. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan dan Kementerian/Lembaga;
- d. Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota;
- e. Rumah Sakit Provinsi, Kabupaten/Kota,
- f. Rumah Sakit/Klinik Swasta;
- g. Puskesmas;
- h. Perguruan Tinggi;
- i. TNI-Polri;
- j. Masyarakat (Organisasi Masyarakat/Organisasi Profesi Kesehatan);
- k. Perusahaan swasta.

## 5) STAKEHOLDERS LAIN

Menurut ISO 26000 SR, *stakeholder* didefinisikan “Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas organisasi” sedangkan menurut standar pengelolaan *stakeholder* AA1000 SES, definisinya adalah “Kelompok yang dapat mempengaruhi dan/atau terpengaruh oleh aktivitas, produk atau layanan.

*Stakeholder* adalah (1) pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan adalah semua pihak, baik masyarakat, individu atau komunitas yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap BBPK Jakarta (2) bagian penting dari BBPK Jakarta yang memiliki peran aktif maupun pasif untuk mengembangkan tujuan.

Adapun *stakeholder* atau pemangku kepentingan BBPK Jakarta terdiri dari:

1. Manajemen: Kepala BBPK Jakarta, pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas;
2. Jabatan fungsional tertentu dan umum;
3. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
4. Unit utama di lingkungan Kemenkes;

5. Dinkes Provinsi di wilayah mitra BBPK Jakarta (Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur);
6. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah mitra BBPK Jakarta;
7. Unit Pelatihan Kesehatan Daerah di wilayah mitra BBPK Jakarta;
8. Politeknik Kesehatan di wilayah mitra BBPK Jakarta;
9. Dinkes Provinsi Jawa Barat;
10. Dinkes Kota Tasikmalaya;
11. Dinkes Kota Depok;
12. Puskesmas lokus praktik lapangan;
13. Kementerian Keuangan RI;
14. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
15. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN);
16. Kemenko Bidang Perekonomian RI;
17. Kemenko Bidang Kemaritiman RI;
18. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI;
19. Kementerian Luar Negeri RI;
20. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
21. Kementerian Pemuda dan olahraga RI;
22. Kementerian BUMN RI;
23. Badan Kepegawaian Negara (BKN);
24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
25. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
26. Badan POM;
27. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
28. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
29. Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI;

30. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
31. Ombudsman RI;
32. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI);
33. Pusat Pendidikan Kesehatan (Pusdikkes) Kodiklat TNI AD;
34. Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes);
35. *Nanyang Technology University of Singapore*;
36. *Instituto Nacional Da Saude (INS)* Timor Leste;

Selain Stakeholder tersebut, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Nomor: HK.02.02/IV/1755/2020 tentang Wilayah Kemitraan Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Bidang Kesehatan, BBPK Jakarta dan Bapelkes Semarang memiliki 12 Provinsi wilayah mitra yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk pembagian wilayah Adapun dalam pembagian wilayah tersebut BBPK Jakarta bekerjasama dengan Bapelkes Semarang.

## **6) PRODUK SUBSTITUSI**

Produk substitusi di BBPK Jakarta:

- a. *In House Training*;
- b. Lokakarya;
- c. *Workshop*;
- d. Seminar;
- e. Magang;
- f. Studi Banding;
- g. *Capacity Building*;
- h. Jasa penggunaan sarana prasarana;
- i. Sarasehan.

## **7) FAKTOR LINGKUNGAN EKSTERNAL LAINNYA**

Faktor lingkungan eksternal lainnya di BBPK Jakarta adalah:



- a. Lokasi strategis di ibu kota negara;
- b. Kemudahan akses (transportasi dan informasi);
- c. Dekat dengan sarana fasilitas pelayanan Kesehatan;
- d. Dekat dengan pusat hiburan.

## **B. FAKTOR INTERNAL**

### **1) AKTIVITAS UTAMA**

Aktivitas utama BBPK Jakarta adalah penyelenggaraan pelatihan sebagai berikut :

- a. Pelatihan Manajemen
  - b. Pelatihan Teknis Kesehatan
  - c. Pelatihan Teknis Non Kesehatan ;
  - d. Pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan
  - e. pelaksanaan kerjasama di bidang pelatihan sumber daya manusia Kesehatan
  - f. penyelenggaraan kerjasama internasional di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan;

### **2) AKTIVITAS PENDUKUNG**

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran
- b. pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pelatihan sumber daya manusia kesehatan
- c. pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan kesehatan
- d. pengelolaan sistem informasi pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
- g. Pengembangan SDM (*capacity building*; pelatihan, kursus, seminar, *workshop*, magang);

- h. Pengembangan sarana prasarana;
- i. Pengembangan Laboratorium Lapangan;
- j. Kegiatan kemasyarakatan dan *Social supporting activities*
- k. Pengembangan dukungan manajemen melalui *e-Office*, *Health Safety Environment* dan Ramah Kebudayaan.

### **C. ANALISIS SWOT**

Analisis lingkungan yang ada di BBPK Jakarta dilakukan menggunakan metode *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)* dengan memperhatikan strategi BBPK Jakarta, meliputi:

1. Jumlah, jenis, dan mutu pelatihan;
2. Sumber daya manusia pengelolaan pelatihan ;
3. Sarana prasarana pelatihan;
4. Sistem teknologi informasi.

Tabel 3.1  
Analisis SWOT

No	Faktor	Kekuatan ( <i>Strength</i> )	Kelemahan ( <i>Weakness</i> )	Peluang ( <i>Opportunity</i> )	Ancaman ( <i>Threats</i> )
1	Jumlah, jenis, dan mutu pelatihan	1) Mendapatkan predikat WBK dari Kemenpan RB pada 12 Desember 2017 2) Memperoleh penghargaan Satker Terbaik I dalam Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBN TA 2017 kategori Pagu DIPA Sedang; 3) Memperoleh peringkat ketiga Kategori Kepatuhan Pelaporan	1) Belum semua kurikulum dan modul pelatihan dimiliki/tersedia 2) Hasil TNA belum diakomodir dalam program pelatihan	1) Adanya UU ASN yang menyatakan pelatihan sebagai hak dari setiap PNS 2) Adanya PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang mewajibkan ASN mengikuti diklat minimal 20 Jpl dalam setahun	1) Inkonsistensi antara RAP Badan PPSPDM dan RAK Pusat Pelatihan SDM dengan pelaksanaan pelatihan. 2) Semakin banyaknya lembaga diklat swasta yang menyelenggarakan pelatihan teknis kesehatan

		<p>Program/Kegiatan PPSDM Kesehatan Kantor Pusat dan Daerah Tahun 2017 berdasarkan <i>Electronic Monitoring and Evaluation (e-Monev)</i>;</p> <p>4) Memperoleh penghargaan sebagai Satker dengan kategori Pagu Sedang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Kedua Tahun 2018;</p>		<p>3) Adanya PP No. 64 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kemenkes</p> <p>4) Mempunyai jejaring lintas sektor dan lintas program</p> <p>5) Kebutuhan pengembangan IT di era globalisasi</p> <p>6) Tuntutan perkembangan teknologi dan</p>	<p>3) Program pelatihan <i>top down</i> dari Pusat Pelatihan SDMKN</p> <p>4) Belum ada kebijakan tentang pengakuan pengampunan program pelatihan sebagai IKU (Indikator Kinerja Utama)</p> <p>5) Kebijakan pengampunan pelatihan yang belum jelas</p>
--	--	---	--	--	---

		<p>5) Terakreditasi <b>A</b> oleh LAN untuk Pelatihan Dasar CPNS</p> <p>6) Sebagai tempat <i>benchmark</i> untuk pelatihan <i>TOC</i> dan <i>MOT</i> yang dilaksanakan oleh LAN;</p> <p>7) Terakreditasi dan mendapatkan sertifikat untuk Akreditasi Institusi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor: HK.02.02/II/7360/2019</p>		<p>metodologi pelatihan</p> <p>7) Kebutuhan Reformasi Birokrasi di bidang pelatihan</p> <p>8) Jenis pelatihan yang beragam untuk tenaga kesehatan dan masyarakat</p> <p>9) Komitmen pemerintah untuk pengembangan SDM Kesehatan dan masyarakat</p> <p>10) Mengembangkan program pelatihan di</p>	
--	--	--	--	--	--



		<p>tanggal 23 Oktober 2019;</p> <p>8) Tsertifikasi ISO 9001: 2015 untuk Pelatihan Kepemimpinan, teknik manajemen dan fungsional;</p> <p>9) Menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dan terakreditasi LAN dengan Nomor: 782/K.1/PDP.09/2019</p> <p>10) Mendapatkan sertifikat dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor:</p>		<p>wilayah kemitraan</p> <p>11) Kebutuhan sertifikasi kompetensi untuk tenaga kesehatan dan SDM Kesehatan</p> <p>12) Banyaknya permintaan dari LAN dan Kementerian/ Lembaga untuk kerjasama penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS dan Diklatpim</p>	
--	--	--	--	--	--

		<p>709/K.I/PDP.09/2018 tanggal 15 November 2018 dengan kategori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akreditasi A untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat IV</li> <li>• Akreditasi A untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat III</li> </ul> <p>11) Tersertifikasi sebagai tempat uji kompetensi tenaga keperawatan;</p> <p>12) Memperoleh penghargaan peringkat II Satker dengan predikat Berhias dari</p>		<p>13) Adanya kebutuhan Widyaiswara untuk mengembangkan kompetensi melalui TOF dan TOT</p>	
--	--	---	--	--	--

		<p>Kementerian Kesehatan.</p> <p>13) Sebagai Tempat Uji Kompetensi Sesaat bagi Penyuluh Anti Korupsi yang dilaksanakan bekerjasama dengan KPK;</p> <p>14) Mempunyai visi dan misi organisasi</p> <p>15) Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam pemberian pelayanan yang dituangkan dalam Nilai-Nilai Organisasi.</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>16) Mempunyai program diklat unggulan di bidang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Kesehatan Perkotaan</li> <li>• Sentra Pelatihan Gender Bidang Kesehatan</li> <li>• Pelatihan Kepemimpinan</li> <li>• Pusat Pengembangan Metode Pembelajaran berbasis IT</li> </ul>			
--	--	---	--	--	--

		<p>17) Mempunyai lima unit instalasi penunjang diklat</p> <p>18) Kepuasan peserta terhadap Proses Belajar Mengajar (PBM) tinggi</p> <p>19) Waktu penyelesaian STTPL/Sertifikat Pelatihan Teknis Kesehatan dan non Teknis Kesehatan tepat waktu</p> <p>20) Adanya wilayah kemitraan di 12 propinsi (Banten, DKI Jakarta, Kalsel, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara,</p>			
--	--	---	--	--	--



		Jateng, Jatim, DIY, NTB, dan NTT) sebagai <i>captive market</i>			
2	Sumber daya manusia pengelolaan pelatihan	<p>1) Adanya kualifikasi pejabat struktural sesuai SOTK BBPK Jakarta (Permenkes Nomor 39 Tahun 2018)</p> <p>2) Sebanyak 93,75% Widyaiswara mempunyai Pendidikan S2.</p> <p>3) Sebanyak 2 orang Widyaiswara mempunyai Pendidikan S3</p> <p>4) Terpenuhinya kualifikasi semua Widyaiswara</p>	<p>1) Belum tersedianya sistem informasi yang berisi tentang kualifikasi dan spesifikasi tenaga kediklatan (diklat dan non diklat);</p> <p>2) Strategi pengembangan SDM belum</p>	<p>1) Adanya <i>political will</i> dari Menteri Kesehatan dan Kepala Badan PPSDM Kesehatan</p> <p>2) Adanya kesempatan bagi seluruh komponen BBPK Jakarta untuk mengikuti Ibel, Tubel dan Pelatihan</p> <p>3) Meningkatnya kebutuhan</p>	<p>1) Banyaknya permintaan pengampuan dari unit utama, profesi, swasta yang berdampak pada <i>performance</i> mengajar SDM internal.</p> <p>2) Jumlah tenaga yang berkurang</p>

		<p>yang dibuktikan dengan sertifikat TOF, TOT dan TPPK</p> <p>5) Adanya struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas untuk semua komponen SDM BBPK Jakarta</p> <p>6) Sebanyak 84 orang dari 117 (71,79%) pegawai BBPK Jakarta yang berpendidikan minimal S1</p> <p>7) Memiliki tenaga kediklatan/pelatihan dan non pelatihan yang kompeten di bidangnya, dibuktikan dengan</p>	<p>didukung <i>grand strategy</i>;</p> <p>3) Kompetensi Widyaiswara belum disesuaikan dengan rumpun pelatihan;</p> <p>4) Belum ada sumber daya manusia dengan kompetensi tenaga <i>programmer</i></p> <p>5) Belum diterapkannya kebijakan</p>	<p>aparatur dan tenaga kesehatan yang professional melalui diklat penjenjangan, pelatihan teknis dan pelatihan fungsional</p> <p>4) Adanya peluang kerjasama dengan unit pembina pelatihan (LAN) dan unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan.</p> <p>5) Adanya rekrutmen CPNS dan P3K</p>	<p>(pensiun, pindah, cuti di luar tanggungan negara)</p> <p>3) Pengusulan rekrutmen pegawai tidak terpenuhi</p>
--	--	---	---	--	---

		<p>adanya sertifikat MOT, TOC, dan TOT</p> <p>8) Standar minimal kebutuhan SDM terpenuhi</p>	<p>penghitungan kelebihan jam mengajar</p> <p>6) Beban kerja semua jenjang widyaiswara masih disamakan</p> <p>7) Belum punya <i>grand design</i> dan pemetaan pengembangan SDM</p> <p>8) Pemahaman tentang uraian tugas di masing-masing komponen SDM BBPK</p>		
--	--	--	--	--	--

			Jakarta masih berbeda-beda		
3	Sarana prasarana pelatihan	<p>1) Memiliki auditorium dua lantai (di Kampus Cilandak dan Kampus Hang Jebat) dengan kapasitas masing-masing 200 orang.</p> <p>2) Memiliki kendaraan operasional: 1 unit bus, 8 unit <i>minibus</i> dan 1 unit sedan yang menunjang kegiatan pelatihan;</p> <p>3) Memiliki 1 unit ambulans yang menunjang kegiatan pelatihan;</p>	<p>1) Belum memaksimalkan kapasitas laboratorium lapangan;</p> <p>2) Instalasi listrik di Kampus Hang Jebat belum tertata dengan baik;</p> <p>3) Belum semua area Kampus Hang Jebat difasilitasi jaringan internet;</p> <p>4) Jaringan internet di Kampus</p>	<p>1) Adanya anggaran pemerintah (APBN) untuk pemenuhan sarana prasarana</p> <p>2) Pemanfaatan auditorium, laboratorium pembelajaran dan fasilitas pelatihan lainnya untuk penyelenggaraan pelatihan oleh pihak ketiga (K/L/Swasta/OP/dll) cukup tinggi.</p>	<p>1) Kurangnya anggaran APBN untuk pengadaan sarana prasarana</p> <p>2) Jaringan komunikasi tidak stabil</p>

	<p>4) Memiliki fasilitas asrama yang berkapasitas 340 orang di lokasi Kampus Cilandak dan Kampus Hang Jebat;</p> <p>5) Memiliki laboratorium pembelajaran yang memadai (laboratorium komputer, bahasa, perilaku, simulasi kesehatan).</p> <p>6) Memiliki Perjanjian Kerjasama Laboratorium Lapangan dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan Kota Depok;</p>	<p>Cilandak masih lemah.</p> <p>5) Belum mempunyai videotron di aula</p> <p>6) Kualitas AVA dalam kelas masih belum optimal</p> <p>7) Jumlah papan <i>flipchart</i> belum mencukupi kebutuhan kelas</p> <p>8) Rendahnya pemanfaatan laboratorium perilaku.</p> <p>9) Belum ada instrumen</p>	<p>3) Adanya komitmen Kemenkes untuk pemenuhan sarana prasarana sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>4) Adanya Peraturan Kepala LAN Nomor 25 tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Diklat Pemerintah dan Permenkes Nomor 725 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan</p>	
--	---	--	--	--

		<p>7) Memiliki perpustakaan yang dilengkapi <i>e-library</i> (i-Jakarta) di Kampus Cilandak;</p> <p>8) Memiliki 8 ruang kelas di Kampus Cilandak dan 6 ruang kelas di Kampus Hang Jebat, masing-masing dengan kapasitas 30 – 40 orang;</p> <p>9) Memiliki 10 ruang rapat berkapasitas @ 10 - 15 orang, yang berlokasi di Kampus Cilandak dan Kampus Hang Jebat.</p> <p>10) Memiliki ruang transit fasilitator yang dapat difungsikan sebagai</p>	<p>monitoring dan pemeliharaan AVA (<i>sound system, lasser pointer, baterai, microphone</i>)</p> <p>10) Perangkat komputer masih ada yang menggunakan <i>software</i> non original</p> <p>11) Tinta printer masih ada yang menggunakan tinta isi ulang.</p> <p>12) Pelayanan publik di lingkup internal BBPK Jakarta</p>	Pelatihan Bidang Kesehatan	
--	--	--	---	----------------------------	--

		<p>ruang rapat dengan kapasitas 10 - 15 orang;</p> <p>11) Memiliki 2 ruang makan di Kampus Cilandak dan 1 ruang makan di Kampus Hang Jebat dengan kapasitas masing-masing 100 orang;</p> <p>12) Memiliki 2 unit ruang menyusui (<i>Nursery Room</i>)</p> <p>13) Memiliki ruang P3K</p> <p>14) Memiliki 1 ruang rumah singgah</p> <p>15) Memiliki 2 ruang <i>room in</i></p> <p>16) Memiliki 2 unit masjid</p>	<p>belum mengoptimalkan pemanfaatan IT</p>		
--	--	---	--	--	--

		<p>17) Memiliki 2 unit Kamar Belajar Mandiri</p> <p>18) Memiliki 2 unit kamar khusus <i>difable</i></p> <p>19) Memiliki 3 unit ruang kamar VIP</p> <p>20) Memiliki kantor yang ramah lingkungan</p> <p>21) Memiliki sarana olahraga: lapangan bulu tangkis, lapangan futsal, basket, tenis, <i>volley</i>, bilyard, tenis meja, yoga, <i>fitness center</i>, taman refleksi dan sepeda.</p> <p>22) Memiliki sarana pemeriksaan kesehatan berupa</p>			
--	--	---	--	--	--



		tensimeter digital, masing-masing 1 unit di Kampus Cilandak dan Hang Jebat. dan alat test gula darah, kolesterol, asam urat mobile			
4	Sistem teknologi informasi	1) Telah memiliki <i>e-office</i> : <i>e-evaluasi</i> , <i>e-learning</i> , <i>e-library</i> , sidiklat, pemanfaatan <i>webinar</i> . 2) Tersedianya sistem informasi organisasi ( <i>website</i> )	1) <i>Skill</i> , pengetahuan dan perilaku SDM untuk mempelajari sistem teknologi informasi masih rendah; 2) Pengelolaan <i>wifi</i> yang belum maksimal pada saat total kapasitas	1) Perkembangan teknologi dan metodologi kediklatan	1) Kompetitor memanfaatkan sistem teknologi dan informasi lebih cepat dan lebih canggih

			pelatihan terpenuhi;		
--	--	--	-------------------------	--	--

#### **D. ASUMSI – ASUMSI**

1. Perluasan paradigma pengembangan kompetensi SDM
2. Digitalisasi proses bisnis organisasi dalam pengembangan kompetensi SDM
3. Peningkatan kompetitor institusi pengembangan SDM

#### **E. ISU STRATEGIS**

Berdasarkan lingkungan strategis tersebut diatas dan memperhatikan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, maka isu strategis yang diangkat dalam Rencana Aksi Kegiatan BBPK Jakarta tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Pelatihan didominasi dengan pelatihan sesuai prioritas nasional sehingga keunggulan lokal tidak terekspos / terakomodir;
2. Pengembangan *grand strategy* SDM Kesehatan dengan area pengembangan SDM;
3. Sistem teknologi informasi belum cukup memadai mengikuti perkembangan revolusi industri untuk eningkatan kompetensi SDM

## **BAB IV**

### **STRATEGI PENGEMBANGAN ORGANISASI**

#### **A. STRATEGI PENGEMBANGAN**

Strategi BBPK Jakarta disusun sebagai tahapan pencapaian tujuan BBPK Jakarta. Tujuan BBPK Jakarta diarahkan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Badan PPSDM Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Strategi BBPK Jakarta pada rentang waktu 2020 – 2024, yaitu:

1. Mendukung program nasional, dengan mengakomodir perubahan kebijakan, situasi dan kondisi bangsa dan negara namun tetap tersedia alokasi untuk melaksanakan program unggulan melalui Optimalisasi RM dan PNBK;
2. Melakukan adaptasi dan perkembangan kekinian mengikuti situasi internasional;
3. Mengembangkan *grand strategy* SDM Kesehatan menuju corporate university; Mengembangkan struktur dan infrastruktur yang akan dengan perkembangan teknologi dan kompetensi SDM;
4. Meningkatkan akses dan manfaat produk BBPK Jakarta melalui marketing publik;

#### **B. SASARAN**

Mengacu kepada Sasaran Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2020 – 2024, BBPK Jakarta melakukan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lim) tahun adalah Pelatihan Teknis Kesehatan, Fungsional Kesehatan, Manajemen Kesehatan, Manajemen Non Kesehatan terakreditasi dan Dukungan Manajemen Pelatihan Kesehatan.

### C. INDIKATOR KINERJA

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, BBPK Jakarta menyelenggarakan Kegiatan pelatihan dengan sasaran kegiatan tercapainya pelaksanaan pelatihan yang bermutu. Indikator kegiatannya adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi
- b. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang bersumber dari PNBP
- c. Persentase peserta TOT dengan nilai akhir  $\geq 80,01$
- d. Persentase peserta pelatihan (latsar dan atau kepemimpinan) dengan nilai akhir  $\geq 80,01$
- e. Persentase peserta pelatihan teknis dan fungsional dengan kualifikasi memuaskan
- f. Persentase widyaiswara yang karya tulis ilmiahnya dipublikasikan
- g. Prosentasi widyaiswara yang melakukan kajian proses pembelajaran
- h. Jumlah modul e-Learning yang disusun
- i. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

### D. TARGET TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan merupakan kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator dan target per tahun. Oleh karena itu, substansi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah *target setting* dari capaian indikator kinerja. BBPK Jakarta merancang dan menyusun RKT berdasarkan indikator kinerja tahun 2020 – 2024. Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan tahun 2020 – 2024, maka diperlukan proyeksi – proyeksi antara lain:

## 1. Proyeksi Kebutuhan SDM

Kebutuhan SDM di BBPK Jakarta dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Proyeksi Kebutuhan SDM Tahun 2020 – 2024

No	Kebutuhan SDM	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PNS	6	6	4	6	6
2	P3K	3	1	2	2	3
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

Total kebutuhan SDM BBPK Jakarta dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024 adalah sebanyak 28 orang PNS dan 11 orang P3K.

## 2. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Kebutuhan peralatan untuk mendukung kinerja BBPK Jakarta tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2  
Proyeksi Kebutuhan Peralatan

No	Kebutuhan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Alat ABMM	5 unit	15 unit	25 unit	25unit	25 unit
2	Alat studio	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
3	Laptop	25 unit	25 unit	40 unit	50 unit	50 unit
4	Peralatan Rumah Tangga	10 unit	15 unit	25 unit	25 unit	25 unit

5	Alat Kesehatan Umum	-	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit
6	Alat Komunikasi	-	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
7	Alat Kantor	-	10 unit	15 unit	15 unit	15 unit
8	Alat Angkut	-	-	-	1 unit	-
9	Alat Laboratorium	-	-	30 unit	30 unit	30 unit
10	Alat Informasi	-	-	10 unit	15 unit	15 unit
11	Alat Kebersihan	-	-	5 unit	5 unit	5 unit
12	Alat Laboratorium	-	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit

### 3. Proyeksi Kebutuhan Pengembangan Subsistem Pendukung

Kebutuhan untuk mendukung kegiatan proses pembelajaran jarak jauh berupa ruang studio, laboratorium simulasi pembelajaran (secara virtual), penerapan *green office*, dan *layout* / perencanaan tata letak ruangan. Sedangkan pengembangan subsistem pendukung untuk kegiatan dan proses pembelajaran jarak jauh antara lain *website*, *Learning Management System* (LMS) dan perangkat lunak yang dibutuhkan.

Kebutuhan pengembangan Subsistem Pendukung kinerja BBPK Jakarta tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Proyeksi Kebutuhan Pengembangan Subsistem Pendukung

No	Kebutuhan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ruang Studio	2 unit	6 unit	6 unit	10 unit	10 unit
2	Laboratorium simulasi pembelajaran	-	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit

3	Green Office	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
4	Pengembangan Website	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
5	LMS	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit



## BAB V

### KEGIATAN, TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020 – 2024

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi kepada tujuan dan sasaran kinerja yang akan dilaksanakan oleh BBPK Jakarta dalam kurun waktu 2020 – 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi BBPK Jakarta.

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka BBPK Jakarta mempunyai target tahunan dari masing – masing indikator sebagai berikut :

- a. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi adalah jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk peserta pelatihan SDM Kesehatan yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi. Data diperoleh dari total pelatihan yang bersumber dari Rupiah Murni. Cara menetapkan target adalah berdasarkan baseline data minimal 1 tahun dan berdasarkan alokasi anggaran yang ditentukan Eselon I dan alokasi peserta latih yang ditentukan dari institusi yang diampu.
- b. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang bersumber dari PNBPN adalah jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk peserta pelatihan SDM Kesehatan yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi. Data diperoleh dari total pelatihan yang bersumber dari PNBPN.
- c. Persentase peserta TOT dengan nilai akhir  $\geq 80,01$  adalah perbandingan peserta TOT yang memperoleh nilai ujian akhir  $\geq 80,01$  dengan total peserta TOT. penetapan nilai diperoleh dari akumulasi *Pre* dan *Post Test*, hasil ujian komprehensif, nilai *microteaching*, sikap dan perilaku. Cara menetapkan target berdasarkan baseline data minimal 1 tahun sebelumnya.
- d. Persentase peserta pelatihan (latsar dan atau kepemimpinan) dengan nilai akhir  $\geq 80,01$  adalah perbandingan peserta pelatihan (latsar dan kepemimpinan) yang memperoleh nilai akhir  $\geq 80,01$  dengan total

- peserta pelatihan latsar dan kepemimpinan. Formulasi perhitungan sesuai dengan PERKALAN yang berlaku. Cara menetapkan target berdasarkan baseline data minimal 1 tahun sebelumnya.
- e. Persentase peserta pelatihan teknis dan fungsional dengan kualifikasi memuaskan adalah perbandingan pelatihan teknis dan fungsional yang memperoleh nilai akhir dengan kualifikasi memuaskan dengan total peserta. Cara menetapkan nilai akhir dengan mengakumulasi penilaian selama proses pembelajaran dan / atau hasil uji komprehensif. Cara menetapkan target berdasarkan baseline data minimal 1 tahun sebelumnya.
  - f. Persentase widyaiswara yang karya tulis ilmiahnya dipublikasikan adalah perbandingan widyaiswara yang membuat karya tulis telah dipublikasikan dengan total widyaiswara. Data diperoleh dari jumlah karya tulis ilmiah yang ditulis oleh widyaiswara dan dipublikasikan di media informasi baik cetak maupun online. Cara menetapkan target berdasarkan baseline data minimal 1 tahun sebelumnya dan berdasarkan jumlah widyaiswara yang mempunyai potensi.
  - g. Prosentasi widyaiswara yang melakukan kajian proses pembelajaran adalah perbandingan widyaiswara yang melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan pelatihan / proses pembelajaran dengan jumlah total widyaiswara yang menjadi pengendali diklat. Data diperoleh dari laporan hasil evaluasi pelaksanaan pelatihan / proses pembelajaran selama yang bersangkutan menjadi pengendali pelatihan. Cara menetapkan target adalah berdasarkan baseline data minimal 1 tahun sebelumnya dan berdasarkan jumlah widyaiswara.
  - h. Jumlah modul e-Learning yang disusun adalah modul per mata pelatihan yang disusun oleh masing – masing dengan menggunakan metode *e-learning*.
  - i. Dukungan manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta adalah meningkatnya dukungan dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di BBPK Jakarta dengan kegiatan yang terdiri dari Penyusunan Rencana Program dan

Penyusunan Anggaran, Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan, Pengelolaan Kepegawaian, Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan perlengkapan dan pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pelatihan.

**Matriks Rencana Kinerja**  
**Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta**  
**Tahun 2020 – 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CARA	TAHUN				
				PERHITUNGAN	2020	2021	2022	2023
1	Tercapainya pelaksanaan pelatihan yang bermutu / Pelatihan Sumber daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	Kompilasi jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk peserta pelatihan SDM Kesehatan yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi setiap tahun dengan sumber dana Rupiah Murni	1.967	3.451	3.451	3.451	3.451
		Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendapat sertifikat pada pelatihan	Kompilasi jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk peserta pelatihan	420	390	390	400	430

	terakreditasi yang bersumber dari PNB	SDM yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi setiap tahun dengan sumber dana PNB					
	Persentase peserta TOT dengan nilai akhir $\geq 80,01$	Jumlah peserta TOT yang memperoleh nilai akhir $\geq 80,01$ dibagi total peserta TOT dikalikan 100	70%	70%	75%	80%	90%
	Persentase peserta pelatihan (latsar dan atau kepemimpinan) dengan nilai akhir $\geq 80,01$	Jumlah peserta pelatihan (latsar dan atau kepemimpinan) dengan nilai akhir $\geq 80,01$ dibagi total peserta pelatihan (latsar dan atau kepemimpinan) dikalikan 100	90%	90%	92%	95%	97%

		Persentase peserta pelatihan teknis dan fungsional dengan kualifikasi memuaskan	Jumlah peserta teknis dan fungsional dengan kualifikasi memuaskan dibagi total peserta teknis dan fungsional dikalikan 100	80%	80%	83%	86%	90%
		Persentase widyaiswara yang karya tulis ilmiahnya dipublikasikan	Jumlah widyaiswara yang karya tulisnya dipublikasikan dibagi jumlah total widyaiswara selama tahun berjalan dikalikan 100	60%	60%	70%	75%	80%
		Prosentasi widyaiswara yang melakukan kajian proses pembelajaran	Jumlah widyaiswara yang melakukan kajian proses pembelajaran dibagi jumlah total	100%	100%	100%	100%	100%

			widyaiswara pada tahun berjalan dikalikan 100					
		Jumlah modul e- <i>Learning</i> yang disusun	Jumlah modul e- <i>learning</i> yang disusun	1	1	5	7	9

**Matriks Rencana Anggaran**  
**Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta**  
**Tahun 2020 – 2024**

*(dalam ribuan rupiah)*

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tercapainya pelaksanaan pelatihan yang bermutu / Pelatihan Sumber daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	20.727.315	23.815.230	26.196.753	28.816.428	31.698.071
		Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang bersumber dari PNBK	4.142.029	4.287.997	4.716.796	5.188.476	5.707.324



	Persentase peserta TOT dengan nilai akhir $\geq 80,01$	1.254.390	3.293.236	3.622.560	3.984.816	4.383.297
	Persentase peserta pelatihan (latsar dan atau kepemimpinan) dengan nilai akhir $\geq 80,01$	11.743.306	9.402.598	10.342.858	11.377.144	12.514.858
	Persentase peserta pelatihan teknis dan fungsional dengan kualifikasi memuaskan	11.871.648	15.407.393	16.948.132	18.642.946	20.507.240
	Persentase widyaiswara yang karya tulis ilmiahnya dipublikasikan	175.620	206.288	226.916	249.608	274.569
	Prosentasi widyaiswara yang	262.800	289.080	317.988	349.787	384.765

		melakukan kajian proses pembelajaran					
		Jumlah modul <i>e-Learning</i> yang disusun	118.400	132.720	145.992	160.591	176.650
2	<b>Dukungan Manajemen</b>	Kegiatan Ketatausahaan	31.971.034	34.953.288	38.448.616	42.293.478	46.522.826

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN MONITORING**

#### **A. SIMPULAN**

Rencana Aksi Kegiatan BBPK Jakarta disusun sebagai acuan kegiatan lima tahun kedepan. Dalam Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kegiatan ini mengaju pada Rencana Aksi Program Badan PPSDM dan Rencana Aksi Kegiatan Puslat SDM Kesehatan. Dalam Menyusun RAK ini melibatkan Bidang Pelatihan Teknis dan Fungsional, Bidang Pelatihan Manajemen dan Teknis Non Kesehatan dan juga Bagian Tata Usaha dilingkungan BBPK Jakarta untuk mencapai Visi dan misi BBPK Jakarta, Visi dan misi ini diharapkan dapat mendukung Visi Badan PPSDM Kesehatan.

Dengan telah disusunnya Rencana Aksi Kegiatan BBPK Jakarta tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan BBPK Jakarta.

#### **B. MONITORING DAN EVALUASI**

##### **1. Monitoring**

Monitoring pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara terus menerus berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Monitoring mencakup aktifitas dan target yang telah ditetapkan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target

yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

## **2. Evaluasi**

Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kegiatan sudah berjalan cukup waktu. Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap.

Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan.

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (*output*). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

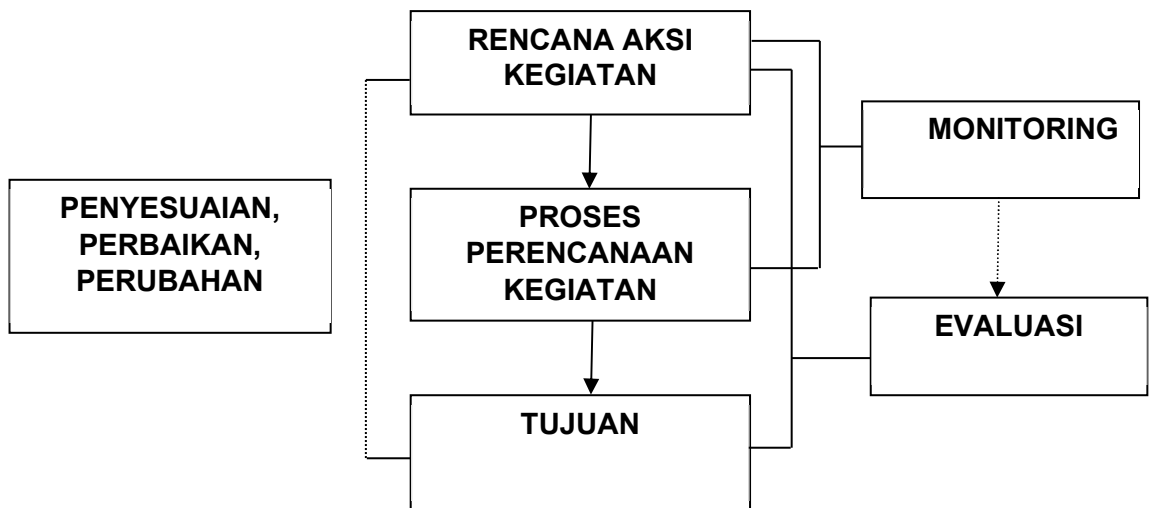
### **C. MERENCANAKAN MONITORING DAN EVALUASI**

Perencanaan monitoring dan evaluasi BBPK Jakarta dilaksanakan pada pertengahan periode anggaran (*midterm*) dan di akhir periode anggaran (*endterm*).

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan pada pertengahan periode anggaran (*midterm*) dimaksudkan untuk melihat dan mengawal implementasi RAK dalam perencanaan kegiatan di BBPK Jakarta. Sedangkan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan pada akhir periode anggaran (*endterm*) untuk mengevaluasi implementasi RAK apakah dalam perencanaan kegiatan sesuai dengan RAK BBPK Jakarta.

#### D. KERANGKA KERJA MONITORING DAN EVALUASI

Kerangka kerja monitoring dan evaluasi di BBPK Jakarta sebagai berikut:



#### Keterangan :

- RAK sebagai acuan dalam proses perencanaan kegiatan di BBPK Jakarta
- Proses perencanaan di BBPK Jakarta mengacu kepada RAK yang sudah disusun baik perencanaan kegiatan maupun dalam penganggaran. Hal itu dilakukan untuk mencapai tujuan BBPK Jakarta dalam rangka mendukung tujuan Badan PPSDM Kesehatan
- Untuk memastikan tujuan sebagaimana tertera di dalam RAK maka dilakukan monitoring dan evaluasi. Metode monitoring dan evaluasi dilakukan dengan observasi, wawancara, *Focus Grup Discussion (FGD)* dan sebagainya.

## E. RENCANA MONITORING

Rencana kegiatan monitoring sebagai berikut :

No	Kegiatan	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	✓											
2	Pelaksanaan Monitoring		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## F. RENCANA EVALUASI

Rencana kegiatan evaluasi dilaksanakan setiap tahun dengan jadwal sebagai berikut :

No	Kegiatan	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan						✓						
2	Pelaksanaan Evaluasi												✓

## G. SUMBER DAYA UNTUK MELAKUKAN MONEV

Sumber daya untuk melakukan monitoring dan evaluasi di BBPK Jakarta adalah dengan menggunakan sumber daya yang ada di BBPK Jakarta, yaitu Bagian Tata Usaha (yang menangani perencanaan), Bidang Pelatihan Manajemen dan Teknis Non Kesehatan, Bidang Pelatihan Teknis dan Fungsional.

## H. PELIBATAN STAKEHOLDERS UNTUK MONEV

Pelibatan *stakeholders* BBPK Jakarta, baik internal maupun eksternal dilibatkan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi dengan melakukan koordinasi kegiatan dan meminta masukan untuk perbaikan kegiatan.

Koordinasi dengan *stakeholders* dilakukan, baik diawal pelaksanaan, dalam proses pelaksanaan, maupun di akhir pelaksanaan kegiatan untuk evaluasi.

## I. INSTRUMEN UNTUK MELAKUKAN MONEV

Instrumen untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi di BBPK Jakarta:

NO	JENIS DOKUMEN	IMPLEMENTASI		KET
		YA	TIDAK	
1	Tujuan BBPK Jakarta			
2	Arah kebijakan - Peningkatan kuantitas dan kualitas diklat aparatur SDM Kesehatan - Peningkatan kuantitas dan kualitas pelatihan tenaga kesehatan dan masyarakat			
3	Strategi Pengembangan a. Peningkatan kuantitas pelatihan - Pengembangan jenis pelatihan sesuai kebutuhan melalui pengkajian kebutuhan pelatihan/TNA ( <i>TrainingNeed Assesment</i> ) - Peningkatan volume pelatihan - Pengembangan penyusunan kurikulum dan modul pelatihan			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan metodologi dan teknologi pelatihan</li> <li>- Pengembangan kajian/penelitian/riset kediklatan</li> </ul> <p>b. Peningkatan kualitas pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan akreditasi pelatihan</li> <li>- Penerapan ISO 9001:2015</li> <li>- Peningkatan pemantauan terhadap semua pelatihan</li> <li>- Peningkatan kepuasan pelanggan</li> <li>- Percepatan proses sertifikasi bagi peserta pelatihan</li> <li>- Peningkatan penyelenggaraan Evaluasi Paska Pelatihan (EPP)</li> <li>- Persiapan TUK Mandiri Uji Kompetensi Antikorupsi Bid Kesehatan</li> </ul> <p>c. Peningkatan sarana prasarana pelatihan</p>			
--	---	--	--	--



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan sarana prasarana pelatihan</li> <li>- Peningkatan pemeliharaan sarana prasarana pelatihan</li> <li>- Peningkatan pelayanan pelatihan yang inovatif</li> <li>- Persiapan Pembangunan Lab Skil</li> </ul> <p>d. Peningkatan kompetensi SDM pengelola pelatihan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan kompetensi SDM BBPK Jakarta melalui pelatihan</li> <li>- Peningkatan pelatihan bagi SDM BBPK Jakarta non pelatihan</li> <li>- Penyiapan Tenaga untuk <i>Urban Health</i></li> </ul> <p>e. Pengembangan sistem pengelolaan keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategi untuk mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yaitu dengan pola Badan Layanan Umum (BLU)</li> </ul>			
4	Sasaran			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan mutu SDM Kesehatan di bidang manajemen dan teknis non kesehatan</li> <li>b. Meningkatkan mutu SDM Kesehatan di bidang teknis dan fungsional</li> <li>c. Meningkatkan Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat</li> <li>d. Meningkatkan Dukungan Manajemen Pelatihan</li> </ul>			
5	<p>Indikator kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan mutu SDM Kesehatan di bidang manajemen dan teknis non kesehatan</li> <li>b. Meningkatkan mutu SDM Kesehatan di bidang teknis dan fungsional</li> <li>c. Meningkatkan Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat</li> <li>d. Meningkatkan Dukungan Manajemen Pelatihan</li> </ul>			
6	<p>Program tahunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan peningkatan mutu SDM Kesehatan di bidang manajemen dan teknis non kesehatan</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Kegiatan peningkatan mutu SDM Kesehatan di bidang teknis dan fungsional</li> <li>c. Kegiatan peningkatan Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat</li> <li>d. Kegiatan peningkatan dukungan Manajemen pelatihan</li> </ul>			
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penganggaran</li> <li>a. Sumber dana APBN</li> <li>b. Sumber dana PNBK</li> <li>c. Sumber dana Lainnya</li> </ul>			

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBPK Jakarta Tahun 2020 – 2024 disusun sebagai acuan kegiatan selama 5 tahun kedepan. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini disusun Bersama dengan Bidang Pelatihan Manajemen dan Teknis Non Kesehatan, Bidang Pelatihan Teknis dan Fungsional dan Bagian Tata Usaha untuk mencapai Visi dan Misi BBPK Jakarta. Rencana Aksi Kegiatan BBPK Jakarta mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan sehingga hasil pencapaiannya dapat mendukung kinerja Badan PPSDM Kesehatan. RAK BBPK Jakarta tahun 2020 – 2024 diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pelaksanaan dan penilaian penyelenggaraan kediklatan.

Dengan telah disusunnya Rencana Aksi Kegiatan BBPK Jakarta tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan di BBPK Jakarta.

Semoga Rencana Aksi Kegiatan yang telah disusun oleh BBPK Jakarta ini dapat bermanfaat untuk pengembangan organisasi BBPK Jakarta ke depannya dan tentunya RAK ini belum sempurna dan akan direview setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebijakan dari Pusat.